

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara demokrasi dalam perspektif budaya Jawa, tidak bisa lepas dari proses demokratisasi di Indonesia. Karena pada kenyataannya budaya Jawa cukup dominan pengaruhnya terhadap proses pembentukan kebudayaan nasional, termasuk budaya berdemokrasi. Bahkan konsep kekuasaan nasional hampir-hampir merupakan representasi dari konsep kekuasaan Jawa. Disamping itu, etnis Jawa sebagai salah satu suku di Indonesia, dengan jumlah penduduk terbesar dan menguasai jabatan-jabatan penting dalam struktur pemerintahan, akan memberikan andil yang cukup besar dalam proses demokratisasi di Indonesia.

Beberapa aspek yang dapat dijadikan faham untuk dikontribusikan terhadap proses demokratisasi dari kebudayaan Jawa, antara lain terlihat dari adanya pepatah yang mengatakan: "Desa mawa cara, negara mawa tata". Desa yang mempunyai cara tertentu mungkin berbeda dengan desa lainnya. Namun negara berhak untuk menatanya, artinya arus bawah, aspirasi dari bawah dapat disalurkan, sebagai bahan untuk menata negara, yaitu sebuah kepentingan yang

lebih besar. Demikian juga tentang konsep Memayu Hayuningrat bagi seorang raja. Artinya, sekalipun kehadiran seorang raja lantaran memperoleh wahyu yang diturunkan oleh Tuhan kepadanya, namun harus dijalankan untuk kepentingan rakyat dan negara.¹

Berkaitan dengan penempatan posisi dan peran politik raja, perspektif pemikiran politik Jawa mendasarkan diri pada dua landasan, dalam pemikiran Jawa diakui adanya paralelisme antara makro kosmos dengan mikro kosmos. Antara dunia "Para Dewa" atau "Dunia Tuhan" dengan dunia tempat manusia hidup. Kedua, yaitu kebutuhan interaksi antara makro kosmos dan mikro kosmos itu. Dua kosmos itu dianggap "menyatu" secara interaksionis.²

Berdasarkan landasan tersebut raja ditempatkan sebagai pusat mikro kosmos, pusat kerajaan manusia di dunia. Secara hierarkis, raja berada dalam hierarki puncak mikro kosmos. Ia dipercaya sebagai satu-satunya medium yang menghubungkan dunia mikro kosmos dengan alam makro kosmos. Ia dipandang sebagai mediator antara manusia dengan Tuhan dan ia juga menjadi refleksi Tuhan. Posisi raja sebagai refleksi Tuhan ini dicerminkan dalam pemikiran politik Jawa melalui konsep *wenang murba wisesa*.

¹ Mohammad Najib.dkk, Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara, LKPSM, 1996, h. 233.

² R.Eep Saefulloh Fatah, Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 36.

Pada puncak hierarki kerajaan, raja "duduk sendiri". Raja berhak atas kehormatan dan menuntut pengabdian segenap rakyatnya, tidak terkecuali dari para abadinya dalam birokrasi kerajaan.

Dalam praktek politik orde baru, posisi puncak hierarki yang diduduki presiden tersebut praktis ditempatinya "sendiri". Hal ini dimungkinkan: pertama, karena sistem politik Indonesia masa orde baru pada dasarnya tidak menempatkan wakil presiden sebagai pemegang posisi kunci dalam pemerintahan yang memiliki kekuasaan riil dan prinsipil. Kedua, "kesendirian" presiden dalam hierarki puncak dibentuk pula oleh keberhasilan presiden dalam mengatur tata kerja para pembantunya, dari tingkat menteri sampai eselon terbawah.

Tetapi untuk keadaan sekarang, presiden yang akan datang tidak tergantung pada presiden yang berkuasa sekarang karena ada MPR/DPR. Sebagai seorang presiden masa orde baru, Soeharto itu orang Jawa yang memimpin Indonesia dan memahami kebudayaan Jawa. Idealnya, Soeharto terpengaruh keras sekali dengan kebudayaan Jawa termasuk gaya kepemimpinannya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, pembahasan terhadap konsep kekuasaan dalam budaya Jawa dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kekuasaan menurut sistem "Raja Jawa" masa lampau dengan konsep kekuasaan menurut presiden masa orde baru.?
2. Bagaimana posisi raja di dalam sistem kerajaan dibanding dengan sistem presiden masa orde baru?

C. Penegasan Judul

Penelitian ini diberi judul "Konsep Kekuasaan dalam Budaya Jawa", untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mempertegas makna dan maksud dari judul di atas:

Konsep adalah pengertian, pendapat (paham) rancangan cita-cita dan sebagainya yang telah ada dalam pikiran.³

Kekuasaan adalah kemampuan dari pelaku (seorang atau kelompok atau lembaga) untuk menetapkan secara mutlak atau mengubah (seluruhnya atau sebagian) alternatif-alternatif bertindak atau alternatif-alternatif memilih, yang tersedia bagi pelaku-pelaku lain.⁴

³ Harun Nasution, Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah Analisa dan Perbandingan, UI-Press, Jakarta, 1986, h. 520

⁴ Prof. Miriam Budiarjo, Demokrasi di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, h. 94.

Budaya Jawa adalah kebudayaan yang ada di daerah kejawen, pe-waris kerajaan Mataram. Budaya Jawa pada umumnya berpusat di istana, sedangkan di luar istana sebagai pusat yang memancarkan budaya.⁵

Dengan demikian, maka secara umum dari judul tersebut adalah bahwa raja berkuasa secara absolut. Kekuasaan yang absolut itu harus dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan rakyat yang diperintah oleh raja. Sebaliknya, supaya raja dapat melaksanakan tugasnya, rakyat mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya (ngemban dhawuh dalem). Dengan demikian antara raja dan rakyat berlaku prinsip jumbuhing atau pamoring kawula gusti (bertemunya rakyat dan raja).⁶

D. Alasan Memilih Masalah

Dalam pemilihan judul tersebut, penulis dengan mendasarkan pada beberapa alasan, diantaranya:

1. Mencoba membandingkan tentang konsep kekuasaan antara raja Jawa pada masa lalu dengan presiden masa orde baru.
2. Agar memperoleh gambaran konsep kekuasaan raja Jawa pada masa lalu dengan presiden masa orde baru.

⁵ Tim Maula, Jika Rakyat Berkuasa, Pustaka Hidayah, Bandung, 1999, h. 104.

⁶ Drs. G. Moedjanto, M.A., Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h. 28.

E. Tujuan Yang Ingin Dicapai

Adapun tujuan penulis mengangkat permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui konsep kekuasaan menurut sistem "Raja Jawa" masa lampau dengan konsep kekuasaan menurut presiden masa orde baru.
2. Untuk mengetahui posisi raja di dalam sistem kerajaan dibanding dengan sistem presiden masa orde baru.

F. Sumber yang Dipergunakan

Sumber-sumber yang dipergunakan dalam penelitian ini secara global yaitu terdiri dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang telah dipublikasikan serta dipergunakan juga yang ada kaitannya dengan permasalahan di atas, dikarenakan studi ini adalah literer atau riset kepustakaan.

G. Metode dan Sistematika Pembahasan

1. Metode Pembahasan.

Adapun metode dalam pembuatan karya ilmiah ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode induksi, diadakan analisis data-data pengalaman human yang konkrit dan individual dalam jumlah terbatas. Kemudian pemahaman yang ditemukan di dalamnya dirumuskan dalam ucapan umum (generalisasi).⁷
- b. Metode deduksi, sebaliknya pemahaman umum (transendental) yang telah ada dan yang diperoleh dari induksi tadi, memberikan latar belakang kepada data-data, sehingga memberikan latar belakang yang sebenarnya dalam data-data itu dapat menonjol dan menjadi jelas.⁸

2. Sistematika Pembahasan.

Untuk memberikan kemudahan penulisan dan pembahasan skripsi ini maka dalam pembahasannya penulis membagi menjadi 5 (lima) bab dan tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Secara garis besar penulis dapat menggambarkan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini berisi uraian singkat dari seluruh pembahasan skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan judul,

⁷ Anton Bakker, Achmad Charriszubair, Metodologi Penelitian Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h.102.

⁸ Ibid., h. 102.

alasan memilih judul, tujuan yang ingin dicapai, sumber yang dipergunakan, metode dan sistematika pembahasan.

BAB II. Membahas berbagai macam pandangan tentang kekuasaan yang meliputi: pengertian kekuasaan dan jenis-jenis kekuasaan.

BAB III. Membahas seputar kekuasaan dalam kebudayaan yang meliputi: konsep kekuasaan menurut sistem "Raja Jawa" masa lampau, konsep kekuasaan menurut presiden masa orde baru, posisi raja dalam sistem kerajaan, posisi presiden masa orde baru.

BAB IV. Analisis.

BAB V. Adalah yang terakhir berisi penutup yang pada intinya merupakan pemecahan dan jawaban final dari uraian-uraian sebelumnya dapat merupakan isi secara garis besar dari skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta diakhiri dengan kata penutup.